

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan aktivitas lainnya¹. Kota mempunyai luas lahan terbatas dan banyaknya permintaan akan penggunaan lahan pada suatu kota yang terus berkembang untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan baik pemukiman, industri, dan penambahan jalur transportasi maupun lahan terbangun lainnya yang dimana perlahan akan menyita lahan-lahan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Gejala umum yang sering dijumpai pada wilayah perkotaan biasanya dikarenakan penambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan kegiatan masyarakat kota.

Sehingga dengan meningkatnya kawasan terbangun akan memberikan konsekuensi terjadinya penyusutan Ruang Terbuka Hijau atau yang biasa dikenal dengan singkatan RTH². Sebagai salah satu karakteristik perkembangan kawasan perkotaan, terjadinya alih fungsi lahan menjadi makin sulit dihindari. Adanya fenomena alih fungsi lahan ini salah satunya disebabkan RTH sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Padahal untuk mengatasi kondisi lingkungan sebuah wilayah yang semakin buruk, peran RTH sangat diperlukan.

Selain itu RTH juga dapat dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat lingkungan tersebut untuk melakukan interaksi sosial, dimana RTH tersebut

¹ Adisasmita, Rahardjo, 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

² Wirakarta, 1992, Undang-undang RI no.24 thn 1992 tentang Penataan Ruang. Aial Wijaya

memiliki fungsi secara ekologis, sosia budaya, arsitektur dan ekonomi, antara lain³: (1) Secara *ekologis*, RTH dapat menurunkan temperatur kota, mengurangi polusi udara, mencegah banjir dan meningkatkan kualitas air tanah. (2) Secara *sosial budaya*, keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang berinteraksi, sarana rekreasi dan sebagai tanda kota berbudaya. Wujudnya seperti taman kota, lapangan olahraga atau makam. (3) Secara *arsitektur*, RTH dapat meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, jalur-jalur hijau dan jalanjalan kota. (4) Sementara ditinjau dari sisi *ekonomi*, jika RTH ini dikelola dengan baik dan menarik maka akan mengundang masyarakat baik dari dalam maupun luar kota yang digunakan sebagai tempat berekreasi dengan banyaknya pengunjung maka dapat membangkitkan sektor perekonomian disekitarnya seperti, PKL, tempat makan dan lain sebagainya.

Dalam UU No 26 Tahun 2007 di pasal 29 ayat 1, 2, dan 3, disebutkan bahwa kawasan RTH untuk wilayah perkotaan harus menyentuh angka 30% dari total luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% sisanya RTH privat⁴. Untuk distribusi dari RTH disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Selain Undang-undang tersebut ada peraturan yang membahas permasalahan RTH yang juga diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan⁵. Di

³ Supriyanto, 1992, Pembangunan Berwawasan Lingkungan (berkelanjutan) sebagai strategi Pembangunan Nasional, FPIPS IKIP Malang. Malang

⁴ Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁵ Permendagri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

dalam peraturan tersebut memuat tentang RTHK yang mencakup tujuan, fungsi, dan manfaat; pembentukan dan jenis; penataan; peran serta masyarakat; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; serta pendanaan dari ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Dalam pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa luas RTH minimal 20% dari luas kawasan perkotaan sudah termasuk publik dan privat.

Tabel 1.1
Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong Tahun 2017

No	Kawasan Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan	Publik (HA)	Privat (HA)
1.	Kawasan Hutan Kota Kelurahan Blimbing Raya MP	4	
2.	Kawasan Taman Kota Tanjung Dan Komplek Pertamina	1.2	
3.	Kawasan Lapangan Golf	20	
4.	Kawasan Tanjung City Center (TCC)	2	
5.	Kawasan Taman Regional Terminal	1	
6.	Kawasan Wisata Tanjung Puri	8	
7.	Kawasan Taman Pemakaman Umum Tanjung dan MP	4	
8.	Kawasan Taman Perumahan Bupati, Gor Dan Stadion	7	
9.	Kawasan Taman Di Lingkungan Perkantoran Pemda Mabuun	2	
10.	Kawasan Hutan Kota Ujung Murung Tanjung	18	
11.	Kawasan Pohon Di Kawasan Pemukiman	1	
12.	Kawasan Bahu Jalan Di Perkotaan Dan Median Jalan	48	
13.	Kawasan Taman Tanjung Selatan	0.5	
14.	Taman Bangun Cari	0.057	
15.	Taman Giat	1.4	
16.	Taman Siring Bersinar	0.2	
17.	Taman Tugu Perjuangan	0.04	
18.	Kawasan Tanjung Bersinar Park	2.7	
19.	Kawasan Perkebunan Kelapa (Tanjung Dan Murung Pudak)		322
20.	Kawasan Perkebunan Karet (Tanjung Dan Murung Pudak)		13
21.	Kawasan Perkebunan Pinang+Rumbia+Kemiri+Aren+Kapuk (Tanjung Dan Murung Pudak)		68
22.	Kawasan Perkebunan		85.6
23.	Kawasan Pertanian Padi Sawah (Tanjung Dan MP)		3.522
JUMLAH		121,097	491,743

Sumber: Disperkimtan, 2017

Dilihat Dari data statistik Disperkimtan Kabupaten Tabalong sampai tahun 2017 masih belum memenuhi kewajiban dalam pembangunan RTH sebesar 30%

seperti yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan⁶. Luas ruang terbuka hijau Kabupaten Tabalong masih mencapai persentase 11% dengan luas wilayah 612,840 ha yang terbagi menjadi dua kategori RTH yaitu 121,097 ha (RTH publik) dan 491,743 ha (RTH privat), sedangkan luas wilayah Kabupaten Tabalong sekitar 376.700 ha, dimana seharusnya luas RTH sekitar 113.010 ha.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong, pemerintah daerah khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan Ruang Terbuka Hijau, dimana Disperkimtan berperan dalam pengelokasian anggaran APBD, mengajukan rancangan berdasarkan instansi masing-masing yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan yang final. Selain Disperkimtan juga ada beberapa instansi yang terkait seperti Bappeda, DLH dan Dinas PUPR. Maka dari itu pemerintah daerah bersama instansi yang terkait perlu membangun hubungan yang loyalitas agar setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh tiap dinas dapat terwujud dengan kerjasama yang baik dan harapannya

⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

pembangunan RTH dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, baik dalam daerah maupun luar daerah⁷.

Pemerintah daerah selaku peran utama khususnya OPD yang bertanggungjawab mengenai pembangunan RTH yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan melibatkan beberapa *stakeholder* lainnya baik dari pihak swasta maupun masyarakat, dimana Peran swasta sendiri dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park terlihat partisipasinya mulai dari awal pembangunan hingga diresmikannya Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park, salah satu pihak swasta terlibat dalam pembangunan tersebut adalah PT Adaro Indonesia, dimana PT Adaro Indonesia selaku produsen tambang batubara terbesar di Kabupaten Tabalong yang memiliki beberapa kontraktor diantaranya adalah PT Pama Persada, PT BUMA, PT SIS, PT RMI, dan PT RAJ.

Dengan berdirinya perusahaan tersebut maka harus adanya bentuk tanggungjawab perusahaan atau yang biasa dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dimana *CSR* saat ini menjadi isu utama yang semakin populer, tidak hanya dibisnis nasional namun juga internasional, karena itu semakin banyak pula badan usaha dan pihak-pihak terkait yang mulai merespon *CSR* dan menyediakan dalam program badan usaha⁸. Tanggung jawab sosial

⁷ Winda Amelia Vada, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu". Jom Fisip Volume 2 No. 1 – Februari 2015

⁸ Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility). Jakarta: PT. Gramedia

perusahaan ini telah tercantum dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74.

Adanya peraturan tersebut diharapkan perusahaan dapat melakukan suatu usaha-usaha yang dapat berdampak positif baik bagi perusahaan maupun lingkungan, social dan masyarakat. Dengan kata lain, CSR diharapkan menjadi sebuah program yang mengedepankan asas keberlanjutan, sehingga implementasi program CSR oleh swasta tidak sebatas hanya untuk menggugurkan tanggung jawab social bagi perusahaan, melainkan, untuk membantu pemerintah dalam pengadaan pelayanan publik. Bantuan yang diberikan pihak swasta dalam pembangunan RTH Tanjung Bersinar Park dalam bentuk fisik seperti pembangunan toilet, tempat duduk dan *playgorund* sedangkan dalam bentuk nonfisik seperti bantuan dana berupa uang.

Selain melibatkan peran swasta pemerintah daerah juga melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan RTH tersebut, dimana telah diatur dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, menyatakan bahwa penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang. Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penataan ruang, menjalankan peranannya dan mendayagunakan kemampuannya secara aktif sebagai sarana untuk mencapai tujuan penataan ruang khususnya terkait kepentingan publik yakni RTH.

Salah satu masyarakat yang terlibat dalam pembangunan RTH Tanjung Bersinar Park adalah salah satu organisasi karang taruna yang ada di Kabupaten Tabalong yaitu karang taruna Teratai Jangkung, dimana karang taruna ini menyumbangkan 15 jenis tanaman pohon dan 50 tempat sampah yang terbuat dari bekas drum. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan RTH di Kabupaten Tabalong maka dapat membantu pemerintah daerah dan dapat menginspirasi organisasi lain yang ada di Kabupaten Tabalong agar ikut berperan aktif dalam program pemerintah. Adanya keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan RTH maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai *collaborative governance*. Dimana *collaborative governance* merupakan bentuk baru dari *governance* yang muncul sebagai strategi baru dalam memerintah dengan mengikutsertakan banyak pihak di dalam prosesnya. Keikutsertaan *stakeholder* seperti pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat menjadi penting untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan⁹.

Di Indonesia anjuran untuk melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam manajemen dan kebijakan publik sektor lingkungan hidup termaktub dalam beberapa regulasi pemerintah. salah satunya adalah Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁰. Inisiasi pemerintahan berpola *collaborative governance* terlihat terus berkembang di berbagai daerah seiring dengan adanya agenda otonomi daerah. Pernyataan ini berdasar pada potret pengelolaan dan pengendalian lingkungan

⁹ Lina Maria Ulfa, “*Collaborative Governance* Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Di Surabaya”. Kebijakan dan manajemen publik, Vol 5, Nomor 3, September-Desember 2017

¹⁰ Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

hidup yang mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat secara aktif mulai dari formulasi sampai evaluasi program.

Dengan demikian di dalam kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam hal pengadaan maupun pemenuhan fasilitas publik dapat memberikan manfaat kepada pihak pemerintah, beberapa manfaat yang dihasilkan dari adanya kolaborasi, (1) menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena di dalam proyek pengoptimalan pengadaan maupun pemenuhan fasilitas publik karena sudah mendapatkan bantuan dari pihak swasta dan masyarakat sekitar (2) menciptakan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (3) peran aktif dari pihak swasta dan masyarakat sangat penting karena merupakan dukungan untuk program pemerintah.¹¹

Pembangunan RTH Tanjung Bersinar Park merupakan bentuk dari *collaborative goveranance* dimana pembangunan ini menelan dana sebesar 16,2 M, dimana pembangunan tersebut mendapatkan bantuan dana dari APBN sekitar 5 M, APBD Provinsi 2 M, APBD Daerah 8,2 M, PT Adaro Indonesia 1 M selaku pihak swasta, dan pihak masyarakat menyumbangkan 15 jenis tanaman serta 50 tempat sampah yang terbuat dari bekas drum. Dengan dana yang sebesar itu maka kondisi RTH Tanjung Bersinar Park sudah cukup memadai, mulai dari adanya

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Amrozi selaku kepala bagian CSR di Bappeda Kabupaten Tabalong

legenda atau peta, fasilitas parkir, tempat sampah, toilet, gazebo, mushola, playground, ruang merokok, ruang menyusui, tempat berolahraga dan lain-lain.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan membahas tentang *collaborative governance* dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang menjelaskan seputar model *collaborative governance*, dengan demikian peneliti akan mengangkat judul **“Collaborative Governance Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong?

¹² Sumber data didapatkan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tahun 2017

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang *collaborative governance* dalam pembangunan RTH Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong serta penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan informasi bagi pihak yang berminat dan terinspirasi dengan penelitian ini, selain itu penelitian ini merupakan hasil dari ilmu yang diperoleh pada mata kuliah Organisasi Manajemen Pemerintahan (OMP).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah daerah yang harus semakin meningkatkan pembangunan RTH khususnya di daerah Kabupaten Tabalong dan Penelitian ini dapat menambah wawasan terkait *Collaborative Governance* dalam Pembangunan RTH khususnya untuk disiplin ilmu pemerintahan, selain bermanfaat untuk pemerintah daerah penelitian ini juga menjadi salah satu proses dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu ilmu pemerintahan dan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat khususnya para organisasi atau LSM yang ada di Kabupaten Tabalong agar ikut terlibat dan berperan aktif dalam program pemerintah daerah dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

1.5 DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual diartikan sebagai definisi-definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lainnya atau mendefinisikan suatu konstruk dengan konstruk lainnya.¹³ Suatu definisi harus mampu menggambarkan karakteristik konsep yang didefinisikan secara ensensial dan objektif. Definisi konseptual memberikan penjelasan yang singkat dan jelas mengenai konsep yang akan digunakan sebagai perspektif dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, perlu peneliti definisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini diantaranya adalah:

¹³Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama Hal 119.

1. *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan pemerintah yang disusun dengan melibatkan badan publik dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik¹⁴. *Collaborative governance* bertujuan untuk menciptakan implementasi program yang efektif, dimana keberadaan organisasi non-pemerintah dapat *mengcover* kebutuhan pemerintah. Salah satu penerapan *collaborative governance* yakni dalam program pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park yang melibatkan PT. Adaro Indonesia sebagai pihak *privat sector* dalam pemenuhan fasilitas RTH, dan masyarakat juga ikut andil dalam pemenuhan fasilitas RTH tersebut.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka adalah ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama, dimana dalam Ruang terbuka terbagi menjadi beberapa macam, dan salah satunya adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Secara umum Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami diluar maupun di dalam kota, dalam bentuk tanaman, area rekreasi kota, atau jalur hijau. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 pasal 9 disebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau harus

¹⁴ Dikutip dari Sambodo & Pribadi, 'Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta', *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 2016, vol. 3, no. 1, hlm. 97-98

memenuhi 30% dari luas wilayah yang terbagi menjadi 20% publik dan 10% privat¹⁵. Kabupaten Tabalong sendiri dalam pembangunan RTH masih belum maksimal, namun ditahun 2017 pemerintah daerah telah menambah satu RTH yang diberi nama Tanjung Bersinar Park, dimana RTH ini didesain dengan memadukan nuansa islami dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tabalong.

1.6 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan kondisi-kondisi, bahan-bahan, dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mengidentifikasi atau menghasilkan kembali satu atau lebih acuan konsep yang didefinisikan.¹⁶ Suatu konsep masih bersifat abstrak dan general. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi variabel-variabel dari konsep tersebut sehingga mempermudah analisis dalam suatu penelitian. Selain itu, melalui definisi operasional dari suatu konsep sebagai definisi variabel penelitian, akan mengurangi kesalahan pengamatan dalam penelitian. Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah :

¹⁵ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

¹⁶ Lok.cit .Silalahi, Ulber. Hal 119

1. Ada beberapa aktivitas atau kegiatan *Collaborative governance* dalam pembangunan RTH Tanjung Bersinar Park.
 - a. Kondisi awal sebelum adanya pelaksanaan kolaborasi dalam penyediaan RTH Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong
 - b. Kepemimpinan Dari *Stakeholder* Yang Terlibat Dalam Kolaborasi Pembangunan RTH Tanjung Bersinar Park
 - c. Proses Kegiatan Kolaborasi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong
 - 1) Penentuan prinsip bersama melalui dialog dan pertemuan antar *stakeholder*
 - 2) Membangun Kepercayaan Dan Pengertian Antar *Stakeholder* Yang Terlibat Dalam Proses Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park
 - 3) Kapasitas Bersama Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park
 - d. Monitoring Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park
 - e. Hasil dari Proses Kolaborasi Pembangunan RTH Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong
 - 1) Penambahan Jumlah Ruang Terbuka Hijau
 - 2) Perubahan sosial setelah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
 - 3) Mempengaruhi Perekonomian Masyarakat Sekitar

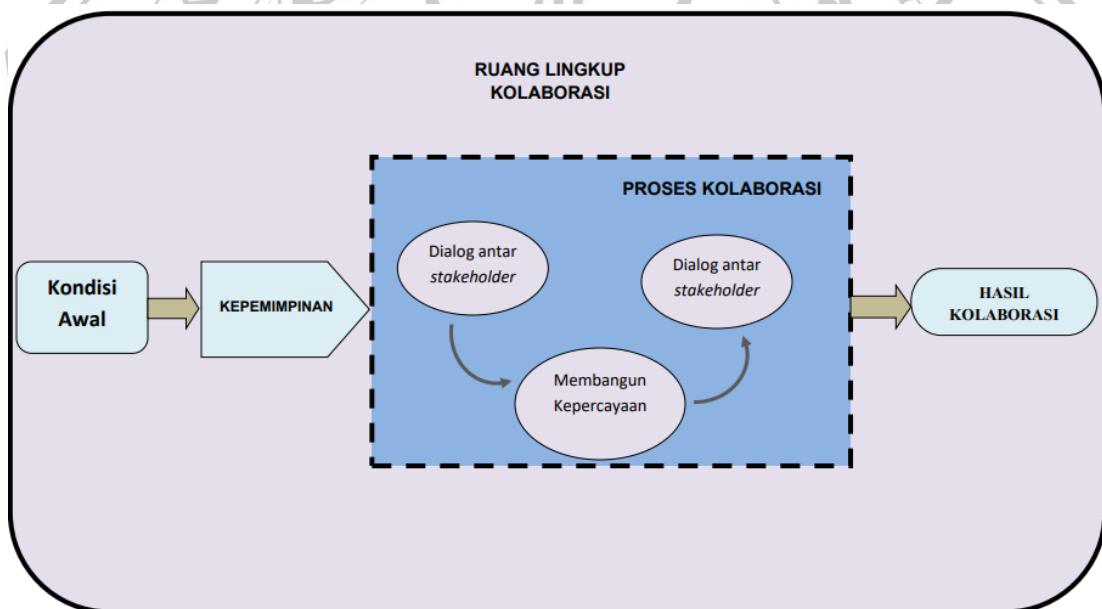
2. Permasalahan yang dihadapi dalam *collaborative governance*.

- 1) Koordinasi antara *stakeholder*
- 2) Tantangan komitmen dalam proses kolaborasi

1.7 Kerangka Berpikir

Berikut merupakan kerangka berpikir yang merupakan argumen peneliti mengenai topik penelitian:

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir Peneliti



Adapun yang dimaksud dari kerangka berpikir peneliti di atas adalah dalam berkolaborasi antar pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong, masyarakat yang diwakili oleh salah satu karang taruna Teratai Jangkung dan swasta yang diwakili oleh PT Adaro Indonesia bersama mitra

kerjanya, terdapat tahapan agar kolaborasi tersebut dapat dikatakan berhasil dan terstruktur, adapun tahapan dalam berkolaborasi, diantaranya adalah perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Ketiga aktor tersebut melakukan kerjasama dalam pembangunan RTH, salah satu bentuk dari kolaborasi tersebut adalah RTH Tanjung Bersinar Park yang berada di kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

Adapun indikator dari konsep *collaborative governance* itu sendiri adalah (1) dinamika dalam proses kolaborasi, dimana dalam dinamika tersebut juga memiliki 3 item diantaranya adalah dialog antar *stakeholder*, motivasi bersama dan kapasitas kegiatan; (2) kegiatan kolaborasi, dalam kegiatan kolaborasi tersebut juga ada beberapa item, diantaranya pembuatan perencanaan strategis, menetapkan suatu kebijakan, penyusunan sumber daya, pelaksanaan kegiatan atau program dan proses monitoring; (3) hasil dari proses kolaborasi tersebut dimana dapat memberikan perubahan kualitas dan kuantitas dari segi fisik, memiliki sumbangsih pada kondisi social masyarakat dan mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar. Dengan adanya kegiatan *collaborative governance* maka *stakeholder* yang terlibat dapat berperan aktif, dan diharapkan jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong dapat mengalami peningkatan.

1.8 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian ini merupakan sebuah prosedur ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis guna mendapatkan data agar dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana metode kualitatif itu sendiri adalah ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu kejadian atau pun fenomena dalam kontek sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi antara peneliti dengan objek atau fenomena yang di teliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam deskriptif kualitatif ini data akan di ambil dengan sebenar-benarnya, dimana penulis akan mendeskripsikan tentang *collaborative governance* dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data Primer, merupakan data yang di dapatkan atau diperoleh langsung dari narasumber. Sumber data primer berasal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong, PT Adaro Indonesia dan Karang Taruna

Teratai Jangkung yang didapat berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder merupakan data tambahan yang dapat dari studi kepustakaan, atau sumber lainnya seperti jurnal, buku, internet, peraturan perundang-undangan serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan akhir ini penulis mengadakan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan beberapa cara diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi di artikan sebagai metode pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki¹⁷. Peneliti akan melakukan observasi lapangan, dimana maksud dari observasi lapang ini adalah, peneliti turun lapang ke tempat penelitian untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan lapangan dan memahami hal-hal yang di dapat dari subyek penelitian terkait *collaborative governance* dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹⁸. Teknik ini di gunakan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak- banyaknya dan mendalam agar terpenuhinya data yang di

¹⁷ Arikunto.S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*; (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal 124

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*; (Bandung: CV Alfabeta, 2013). Hal 231

butuhkan oleh peneliti. Wawancara pada penelitian ini dilakukan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong. Peneliti akan menentukan fokus daftar pertanyaan atau biasa di sebut *interview guide*. Dengan demikian peneliti dapat terarah dalam mewawancara subyek penelitian.

Setelah melakukan observasi dan wawancara maka peneliti melakukan dokumentasi, dimana teknik dokumentasi berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga ataupun organisasi maupun dari perorangan.¹⁹ Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.²⁰ Dokumentasi merupakan salah satu metode terpenting dalam teknik pengumpulan data karna dokumentasi dapat menunjukkan sebuah fakta atau kebenaran yang terjadi di lapangan. Dari teknik pengumpulan data ini peneliti akan mencari data pendukung seperti foto, tabel, grafik dan lain-lain yang berhubungan dengan yang di teliti, dimana dokumentasi ini adalah data penguat dalam pendeskripsian hasil penelitian.

¹⁹ Ibid,hal 72

²⁰ Ibid;hal 240

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang – orang yang dapat memberikan sebuah informasi tentang sesuatu yang sedang di teliti. Peneliti akan memfokuskan penelitiannya terhadap *collaborative governance* dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tabalong. Dengan demikian untuk mendapatkan informasi yang relevan, maka subyek penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong, dengan Bapak Ervin selaku Kepala Bidang Pemukiman & Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) Disperkimtan Kabupaten Tabalong
- b. PT Adaro Indonesia dengan bapak Fajerianur Mus'Adi selaku Section Head divisi External Relation Division, Department Community Relation and Mediation
- c. Karang Taruna Teratai Jangkung dengan bapak Syafaruddin selaku fungsional umum dari Karang Taruna Teratai Jangkung

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat bagi penulis untuk mendapatkan data dari suatu penelitian yang sedang diteliti sehingga data yang di dapatkan lebih akurat dan dapat di pertanggung jawabkan, Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Disperkimtan Kabupaten Tabalong yang beralamatkan di P.H.M. No 13 jalan Ir Juanda Mamuju, Kelurahan

Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya di PT Adaro Indonesia yang berada di Jl Jend A Yani Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong 71513 dan yang terakhir adalah penelitian di Karang Taruna Teratai Jangkung, yang beralamatkan di Kecamatan Jangkung, Kabupaten Tabalong.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif mengenai *Collaborative governance* dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tabalong. Pengertian dari analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain²¹. Ada Beberapa cara untuk menganalisis sebuah data, diantaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

Analisis data yang pertama dilakukan pengumpulan data, pengumpulan data dapat diartikan sebagai bagian integral dari kegiatan analisis data, dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.²²Proses pengumpulan data dilakukan saat pra penelitian dan pada saat penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik untuk menentukan batas akhir dari pengumpulan data di lapangan, karena sepanjang penelitian masih berlangsung selama itulah pengumpulan data-data yang

²¹ Bogdan dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:CV Alfabeta ;2013) Hal 244

²² Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 70

dibutuhkan oleh peneliti akan dilakukan. Sebagaimana yang telah peniliti sampaikan di sub-bab sebelumnya bahwa pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung, melakukan wawancara dengan informan, membuat dokumentasi dan membuat catatan lapangan.

Langkah yang kedua adalah Reduksi data, dimana dalam kegiatan reduksi data diantaranya adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. ²³Pada proses ini, peneliti lakukan setelah mendapatkan data-data dari kegiatan wawancara, hasil observasi dan hasil studi dokumentasi yang kemudian diubah menjadi bentuk tulisan dan dikategorisasikan sesuai fokus bahasan masing-masing. Setelah itu dilakukan reduksi atau memilah data-data yang telah dikumpulkan lalu menggabungkan atau menghubungkan antar data yang telah dipilah. Dengan demikian data yang telah direduksi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menemui data-data yang sesuai dengan pokok bahasan. Selain daripada itu dapat mempermudah proses pengumpulan data selanjutnya.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan

²³ *Op.cit.* Sugiyono. Hal 247

apa yang telah dipahami tersebut. ²⁴Penyajian data di arahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah di pahami, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar katagori serta diagram alur.

Dan yang terakhir dalam penganalisa data adalah kesimpulan dimana kesimpulan data dapat diartikan sebagai proses verifikasi dari data-data yang telah dipilah pada tahap sebelumnya yang kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. ²⁵Jadi pada tahap kesimpulan data menjurus pada jawaban pada fokus bahasan dan mengungkap fakta dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Pada tahap ini proses analistik tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara simultan di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Maka dapat di tarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini dan dapat diketahui hasil akhir dari suatu penelitian.

Untuk analisis data disini peneliti akan mengolah dan menafsirkan data untuk di analisis, langkah ini melibatkan transkrip atau salinan wawancara, mengetik catatan lapangan, mensortir dan mengatur data menjadi berbagai jenis sesuai dengan sumber informasi yang peneliti dapatkan. Kemudian, membaca keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian membuat catatan atau gagasan penting dari data yang telah di peroleh tersebut.

²⁴ *Ibid*, Hal 341.

²⁵ *Ibid*.Hal. 342.